

# DAMPAK PELAKSANAAN SOSIALISASI TERHADAP PARTISIPASI BERSEKOLAH ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) MELALUI PROGRAM GERAKAN KEMBALI BERSEKOLAH (GKB) DI KABUPATEN BREBES, JAWA TENGAH

Zakya Khaerunissa<sup>1</sup>, Riany Laila Nurwulan<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Unpas Bandung

Email: [zakyakhaerunissa001@gmail.com](mailto:zakyakhaerunissa001@gmail.com), [riany.lailanurwulan@unpas.ac.id](mailto:riany.lailanurwulan@unpas.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini berjudul *Dampak Pelaksanaan Sosialisasi terhadap Partisipasi Bersekolah Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah*. Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan seberapa besar dampak pelaksanaan sosialisasi program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) terhadap partisipasi bersekolah Anak Tidak Sekolah (ATS). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB); (2) Untuk mengetahui bagaimana partisipasi bersekolah Anak Tidak Sekolah (ATS) terhadap program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB); (3) Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan program GKB dan upaya dalam menghadapi hambatan; dan (4) Implikasi praktis dan teoritis pekerja sosial dalam menangani Anak Tidak Sekolah (ATS). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu orang-orang yang sengaja dipilih sesuai dengan kriteria kebutuhan penelitian. Jumlah informan pada penelitian ini, yaitu tiga orang dengan rincian sebagai berikut: satu orang dari ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kabupaten Brebes, satu orang peneliti muda dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Kabupaten Brebes, dan satu orang perencana muda dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Kabupaten Brebes. Pengumpulan data menggunakan data sekunder dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis komponensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) terdapat 3 alur pelaksanaannya, yaitu pendataan, pengembalian, pendampingan dan pemantauan; 2) Dampak program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) yang ada di Kabupaten Brebes memiliki dampak, tetapi belum sepenuhnya berhasil terhadap peningkatan partisipasi bersekolah; 3) Dalam pelaksanaan program GKB terdapat beberapa hambatan, yaitu dari faktor data, faktor pemerintahan, dan faktor anggaran dana. Adapun upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut, yaitu sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan; 4) Peran pekerja sosial dalam menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah sebagai penghubung, fasilitator, dan motivator.

**Kata Kunci:** Anak Tidak Sekolah (ATS), Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), Partisipasi Bersekolah

## Abstract

This study was titled *The Impact of Socialization Implementation on Participation in Unschooled Children (ATS) through the Re-School Movement Program (GKB) in Brebes Regency, Central Java*. This study is the result of a study that illustrates how much impact the socialization of the Re-School Movement (GKB) program has on the participation of non-Schooled children (ATS). This study aims to: (1) Knowing and describing the implementation of the Back-to-School Movement (GKB) program; (2) Knowing how the participation of non-Schooled children (ATS) in the Back-to-School Movement program (GKB); (3) Knowing what barriers to implement the GKB program and efforts to deal with barriers; and (4) Practical and theoretical implications of social workers in dealing with Unschooled Children (ATS). The method used in this study is a qualitative method using a literature study approach. The selection of informants used is purposive sampling, which is people who are deliberately selected according to the criteria for research needs. The number of informants in this study were three people with the following details: one person from the head of the Education Concern Community Forum (FMPP) of Kabupaten Brebes, one young researcher from the Regional Research and Development Planning Agency (Baperlitbangda) of Kabupaten Brebes, and one young planner from the Regional Research and Development Planning Agency (Baperlitbangda) of Brebes Regency. Data collection using secondary data and in-depth interviews. The data analysis technique used in this study is a comprehensive analysis technique. The research results show that: 1) In the implementation of the Re-School Movement (GKB) program, there are 3 implementation channels,

<sup>1</sup> Mahasiswa Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Unpas

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Unpas

*namely data collection, return, assistance and monitoring; 2) The impact of the re-School Movement program in Brebes Regency has had, But it has not fully succeeded in increasing school participation; 3) In the implementation of the GKB program there are several obstacles, namely data factors, governance factors, and fund budget factors. As for the efforts made in dealing with these obstacles, namely socialization regarding the importance of education; 4) The role of social workers in handling Out of School Children (ATS) is as a liaison, facilitator, and motivator.*

**Keywords:** *Out of School, Back to School Movement Program (GKB), School Participation*

## PENDAHULUAN

Putus sekolah bukanlah persoalan baru di bidang pendidikan dan menjadi isu global. Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) menunjukkan masih adanya permasalahan serius dalam pemerataan layanan pendidikan. Fenomena anak putus sekolah sudah menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi di dalam dunia pendidikan, fenomena tersebut secara umum sering terjadi di Indonesia maupun di Kabupaten Brebes sendiri khususnya. Berdasarkan fenomena tersebut, Ali Imron (2011: 159) mengemukakan bahwa anak putus sekolah yaitu anak yang keluar dari sekolah sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum ia lulus. Pada kasus-kasus anak putus sekolah, tidak selamanya dapat dipecahkan. Salah satu penyebab tingginya angka anak putus sekolah pada usia wajib belajar, yaitu adanya kendala pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Apabila permasalahan pendidikan tersebut tidak dapat ditangani dengan benar dan sungguh-sungguh, maka akan menyebabkan dampak yang sangat besar dan dapat berimbas terhadap masyarakat sekitar bahkan pada negara.

Fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) juga terjadi di Kabupaten Brebes yang menjadi fokus utama penelitian ini. Kabupaten Brebes merupakan salah satu Kabupaten yang cukup luas ke-2 di Provinsi Jawa Tengah, luas wilayah Kabupaten Brebes mencapai 1.769,62  $km^2$ . Berdasarkan pada hasil Sensus Penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 menurut Kota/Kabupaten, jumlah penduduk Kabupaten Brebes berjumlah 1.813.594 jiwa. Kabupaten Brebes memiliki 17 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 292 Desa. Jumlah wilayah yang cukup luas serta jumlah penduduknya yang padat, maka keterbatasan akses terhadap pendidikan menjadi suatu masalah yang terjadi sehingga banyak Anak Tidak Sekolah (ATS) cukup tinggi di Kabupaten Brebes. Menurut data yang dicatat oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes pada tahun 2018, bahwa tercatat ada 17.420 anak tidak sekolah (ATS) yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Brebes.

Tabel 1. Sebaran Anak Tidak Sekolah (ATS) menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Anak Tidak Sekolah/Drop out
1.	Tanjung	1.220 ATS
2.	Bulukamba	1.292 ATS
3.	Wanasari	645 ATS
4.	Brebes	760 ATS
5.	Jatibarang	979 ATS
6.	Songgom	670 ATS
7.	Larangan	1.260 ATS
8.	Sirampong	410 ATS
9.	Tonjong	688 ATS
10.	Paguyangan	1.195 ATS
11.	Bumiayu	512 ATS
12.	Bantarkawung	2.035 ATS
13.	Salem	1.017 ATS
14.	Katangungan	1.359 ATS
15.	Banjarharjo	1.153 ATS
16.	Kersana	326 ATS
17.	Losari	1.899 ATS
<b>Total</b>		17.420 ATS

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes tahun 2018

Fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Sukmadinata dikutip dari Ayu Yeni Budi Lestari *et. al* (2020) yaitu faktor utama Anak Tidak Sekolah (ATS) yaitu kesulitan ekonomi disebabkan karena memenuhi kebutuhan

hidup keluarganya, sehingga masih banyak dijumpai anak usia sekolah yang rela untuk meninggalkan pendidikan formal. Hal tersebut yang menjadikan angka anak putus sekolah terbilang masih tinggi. Faktor ekonomi dan kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama anak putus sekolah dan kemudian mereka bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Kesulitan dalam ekonomi keluarga membuat orang tua lebih memilih agar anak bekerja daripada sekolah.

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama di bidang pendidikan dapat dilihat dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah anak tidak sekolah (ATS) yang disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Brebes. Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama di bidang pendidikan, maka pemerintah Kabupaten Brebes menghadirkan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) merupakan gerakan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan guna memperkuat kepentingan terbaik bagi anak. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) yaitu kegiatan yang insiasinya berasal dan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan tujuan untuk mengembalikan anak usia sekolah (7–18 tahun) yang sedang tidak sekolah atau putus sekolah agar dapat kembali bersekolah atau belajar di lembaga pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Pelaksanaan dan keberhasilan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) tidak bisa hanya dilibatkan dari satu pihak saja, tetapi membutuhkan peran serta dan dukungan dari berbagai sektor.

Gerakan Kembali Bersekolah dirintis pada tahun 2016, tujuan dirintisnya program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) ini karena adanya desakan dari masyarakat pemerhati pendidikan. Sebelum adanya program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), masyarakat pemerhati pendidikan telah membangun program melalui sekelompok kecil yang saat itu dinamakan Celoteh Brebes Membangun (CBM) yang memiliki tujuan sama yaitu mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan melakukan upaya rekonfirmasi anak yang tidak sekolah, menggalang dana swadaya, dan melakukan pendampingan baik di sekolah maupun di rumah Anak Tidak Sekolah (ATS). Adanya dana yang terbatas, maka pada saat itu hanya 30 anak yang dikembalikan untuk bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dengan fokus garapan di Kecamatan Larangan dan Ketanggungan.

Partisipasi masyarakat terutama dalam pendidikan pada suatu wilayah berdampak pada partisipasi pendidikan. Jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di wilayah tersebut. Selain itu, salah satu cara dalam peningkatan pendidikan untuk mendorong perkembangan pada suatu negara ialah dengan cara meningkatkan partisipasi pendidikannya. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah.

Pada tahun 2017 Bupati Kabupaten Brebes mencanangkan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Pendopo Kabupaten Brebes dengan menghadirkan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Brebes mulai melibatkan relawan Celoteh Brebes Membangun (CBM) untuk masuk ke dalam kelembagaan resmi yang dipayungi oleh regulasi Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP). Anak Tidak Sekolah (ATS) yang kembali bersekolah ke jalur pendidikan disebut juga sebagai siswa Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak hanya terbatas pada pengembalian ke jalur pendidikan formal saja, tetapi dapat pula meliputi jalur pendidikan non-formal dan informal. Jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu SD sampai SMA/ sederajat. Sedangkan pada jalur pendidikan non-formal diselenggarakan pada kelompok belajar paket A (pendidikan dasar non-formal yang sederajat dengan SD/MI), paket B (pendidikan dasar non-formal yang sederajat dengan SMP/MTs), atau paket C (pendidikan dasar non-formal yang sederajat dengan SMA/SMK/MA).

Indikator dalam keberhasilan program di bidang pendidikan yang dilakukan untuk menghitung partisipasi sekolah terdapat tiga metode, yaitu dapat diukur dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) ialah indikator yang digunakan dalam menentukan penduduk usia sekolah dengan melakukan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu (tanpa melihat ketepatan usia penduduk tersebut) dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka Partisipasi Murni (APM) ialah indikator yang digunakan dalam

perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk yang usia sesuai dan dinyatakan dalam bentuk persentase.

Pada Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud 2020–2024 disebutkan bahwa, secara garis besar arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) salah satunya yaitu dalam optimalisasi angka partisipasi pendidikan. Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan yaitu: (1) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini meningkat; (2) Wajib belajar sembilan tahun tuntas dan wajib belajar dua belas tahun meningkat; dan (3) Angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat. Terkait dengan program wajib belajar dua belas tahun, pemerintah telah menyusun beberapa strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut, salah satu diantaranya adalah melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak yang tidak sekolah atau anak berkebutuhan khusus yang dilakukan dengan berbagai langkah. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, salah satunya yaitu melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) serta pelaksanaan program *retrieval* untuk anak putus sekolah.

Guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama di bidang pendidikan dan menurunkan jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Brebes, maka pemerintah Kabupaten Brebes melakukan sosialisasi pemahaman mengenai pentingnya pendidikan melalui program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) kepada masyarakat. Selain sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan, pemerintah Kabupaten Brebes juga melakukan sosialisasi untuk mengenalkan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), yaitu sebuah program untuk menurunkan angka anak putus sekolah. Sosialisasi pengenalan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) tidak hanya dilakukan kepada masyarakat, tetapi sosialisasi juga dilakukan ke lembaga-lembaga sekolah seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) dan Kementerian Agama. Sosialisasi pengenalan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) ini bertujuan untuk meminta dukungan dari semua pihak agar program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dapat berjalan dengan baik.

Tujuan adanya sosialisasi ke lembaga-lembaga sekolah, yaitu agar dapat menerima siswa-siswa yang asalnya dari Anak Tidak Sekolah

(ATS) menjadi siswa GKB (Gerakan Kembali Bersekolah) dan sosialisasi tersebut dilakukan sesuai peran Organisasi Perangkat Daerah. Selain melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), pemerintah Kabupaten Brebes juga melibatkan Kementerian Agama dalam sosialisasinya. Sosialisasi pengenalan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) tidak hanya dilakukan kepada masyarakat, tetapi juga menyebar luaskan mengenai program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) ini melalui dunia maya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Dampak Pelaksanaan Sosialisasi terhadap Partisipasi Bersekolah Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah”**. Peneliti tertarik dengan topik anak tidak sekolah (ATS) terutama pada program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), karena peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai partisipasi bersekolah anak putus sekolah dari adanya pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes.

## METODE

Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Tujuan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian ini dapat menyeluruh dan objektif mengenai dampak pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) terhadap partisipasi bersekolah anak putus sekolah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber kedua untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder juga dapat dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk mendukung data agar data yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti. Data yang diperoleh berupa arsip, dokumen resmi, jurnal, buku, website, dan portal berita. Dari sumber-sumber tersebut maka diperoleh data yang berkaitan dengan anak putus sekolah dan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).
2. Data primer yaitu data yang langsung didapatkan dari data oleh peneliti dengan tujuan khusus penelitian. Dengan kata lain,

data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber pertama. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara.

Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan dalam pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang biasa digunakan yaitu orang yang diperkirakan paling paham mengenai data atau keterangan informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam hal ini, peneliti ingin mengkaji mengenai dampak pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dalam peningkatan partisipasi bersekolah anak putus sekolah di Kabupaten Brebes. Maka informan yang diambil oleh peneliti, yaitu Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) dan Peneliti Muda serta Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes karena mampu memberikan informasi mengenai pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) yaitu kegiatan yang inisiasinya berasal dan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan tujuan untuk mengembalikan anak usia sekolah (7–18 tahun) yang sedang tidak sekolah atau putus sekolah untuk dapat kembali bersekolah atau belajar di lembaga pendidikan formal, non-formal, atau informal. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) merupakan sebuah upaya perbaikan akses pada pelayanan dasar bidang pendidikan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Anak Tidak Sekolah (ATS) yang kembali bersekolah ke jalur pendidikan disebut juga sebagai siswa Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak hanya terbatas pada pengembalian ke jalur pendidikan formal saja, tetapi dapat pula meliputi jalur pendidikan non-formal dan informal. Jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu SD sampai SMA/ sederajat. Sedangkan pada jalur pendidikan non-formal diselenggarakan pada kelompok belajar paket A (pendidikan dasar non-formal yang sederajat dengan SD/MI), paket B (pendidikan dasar non-formal yang sederajat dengan SMP/MTs), atau paket C (pendidikan dasar non-formal yang sederajat dengan SMA/SMK/MA). Selain itu dalam rangka untuk memenuhi hak-hak

Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari data-data melalui dokumen, buku, jurnal, artikel, dan website. Adapun data yang diperoleh melalui dokumentasi ini yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM), dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes dan wawancara. Spradley (1980) membagi analisis data pada penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan penelitian peneliti dalam model Spradley, yaitu teknik Analisis Komponensial (*componential analysis*). Dalam analisis kualitatif, teknik komponensial digunakan untuk menganalisis unsur-unsur yang terdapat hubungan-hubungan yang kontras satu sama yang lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara terperinci. Data tersebut dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi.

anak serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan, program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dikukuhkan oleh Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Pasal 2 Tahun 2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun.

Sasaran program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) yaitu Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berusia 7–18 tahun untuk pendidikan formal, sedangkan untuk pendidikan non-formal pada usia 7–21 tahun. Adapun sasaran program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) pada Rintisan Penuntasan Pendidikan dua belas tahun dalam Peraturan Bupati No. 115 Pasal 3 Ayat 1 Tahun 2017, yaitu:

- a. Anak yang belum mengikuti pendidikan atau putus sekolah SD atau pendidikan yang sederajat;
- b. Anak yang telah lulus SD atau pendidikan yang sederajat, yang belum memperoleh kesempatan belajar, dan yang putus sekolah di SMP atau pendidikan yang sederajat;
- c. Anak yang telah lulus SMP atau pendidikan yang sederajat, yang belum memperoleh kesempatan belajar, dan yang putus sekolah di SMA atau pendidikan yang sederajat;

- d. Anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pendidikan dua belas tahun.

Dalam pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) terdapat beberapa alur yang dilaksanakan. Adapun alur Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) pada pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) ke sekolah, yaitu :

1. Pendataan, dari hasil wawancara peneliti dengan perencana muda di Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Bapak Bayu Setiawan, S. Kom) pendataan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dalam pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) ke sekolah. Informasi penting yang perlu diketahui pada saat pendataan yaitu tentang nama Anak Tidak Sekolah (ATS), alamat tempat tinggal Anak Tidak Sekolah (ATS), serta alasan mengapa seorang anak usia sekolah tidak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sumber utama rujukan data Anak Tidak Sekolah (ATS), yaitu dari data SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat), pendataan khusus Anak Tidak Sekolah (ATS), data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang dikelola oleh Kemendikbud, data EMIS (*Education Management Information System*) yang dikelola oleh Kementerian Agama, dan BPS melalui susenas. Ketika data sudah lengkap, maka selanjutnya yaitu Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) melakukan rekonfirmasi kesediaan untuk kembali bersekolah kepada Anak Tidak Sekolah (ATS) dan keluarganya. Apabila ATS dan keluarganya bersedia untuk kembali bersekolah maka akan dibuktikan dengan surat pernyataan mengenai kesediaan untuk kembali bersekolah dari ATS dan keluarganya.
2. Pengembalian, dari hasil wawancara peneliti dengan perencana muda di Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Bapak Bayu Setiawan, S. Kom) pada alur ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu konsolidasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang akan dikembalikan ke sekolah atau ke lembaga pendidikan lainnya data tersebut harus benar-benar telah terverifikasi. Pada alur pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat disesuaikan dengan kalender pendidikan, yaitu pada awal tahun ajaran baru. Jika tidak

dapat dilakukan, disarankan untuk dilakukan pada akhir semester. Hal tersebut bermaksud agar Anak Tidak Sekolah (ATS) terdaftar di data Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Ketika melakukan proses pengembalian, pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kabupaten Brebes (Bapak Bahrul Ulum, S. E., M. Si), ketika rekonfirmasi selesai maka Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) melakukan proses administrasi. Tetapi, ketika melakukan proses administrasi menuju sekolah tidak sedikit anak yang bersedia kembali bersekolah tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap. Hal tersebut sangat penting, karena sebelum anak tersebut dikembalikan ke sekolah, dokumen pendukung untuk konsolidasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang akan dikembalikan ke sekolah atau ke lembaga pendidikan lainnya data tersebut harus benar-benar telah terverifikasi.

3. Pendampingan dan pemantauan, dari hasil wawancara peneliti dengan perencana muda di Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (Bapak Bayu Setiawan, S. Kom) alur ini merupakan upaya untuk mendampingi serta memantau perkembangan siswa Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) secara reguler dan berkelanjutan. Tujuan dari adanya pendampingan dan pemantauan yaitu untuk memastikan siswa Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) tetap bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya.

Adanya program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) partisipasi bersekolah meningkat. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan dan animo masyarakat terhadap pentingnya pendidikan serta adanya dukungan dana dari pemerintah. Hal itu ditandai dengan meningkatnya partisipasi bersekolah dan membuktikan meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

Pengaruh program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) perlu diuji dengan *outcome* yang didapatkannya. Salah satu *outcome* yang sangat penting yaitu mengenai Angka Partisipasi Sekolah (APS) atau daya serap pendidikan. Sampel kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kenaikan rata-rata lama sekolah dan harapan lama

sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Data tersebut diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018–2021 yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Brebes.

### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian dalam pembangunan manusia yang berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh suatu pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu: 1) Umur panjang dan hidup sehat; 2) Pengetahuan; 3) Standar hidup layak. Jika dilihat dari sisi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) pada rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes Tahun 2018–2021

Komponen IPM	IPM Kabupaten Brebes			
	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,68	66,12	66,11	66,32
Angka Harapan Hidup	68,84	69,04	69,33	69,54
Harapan Lama Sekolah	12,02	12,03	12,04	12,05
Rata-rata Lama Sekolah	6,19	6,2	6,21	6,22
Rata-rata Pengeluaran per Kapita	9.890	10.38	10.058	10.152

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah

Pada tabel diatas berkenaan dengan unsur pendidikan, dapat dilihat bahwa harapan lama sekolah di Kabupaten Brebes tahun 2021 sebesar 12,05 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang

diharapkan akan dirasakan oleh anak-anak pada usia 7 tahun ke atas di masa yang akan datang yaitu selama 12,05 tahun atau berpeluang tamat pada jenjang pendidikan SMA. Tetapi, rata-rata lama sekolah pada tahun yang sama yaitu sebesar 6,22 tahun. Artinya bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SMA. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa dari adanya program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) terdapat peningkatan partisipasi bersekolah. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari IPM pada rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan yang tidak cukup tinggi yaitu sebesar 0,01% serta harapan lama sekolah mengalami kenaikan. Jika berdasarkan data tersebut memperlihatkan bahwa adanya peluang bersekolah sampai jenjang pendidikan SMA, tetapi pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA.

### Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan suatu indikator untuk melihat gambaran secara umum penduduk usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS), artinya makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu daerah. Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang tinggi dapat menunjukkan terbukanya suatu peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) berkisar antara 0–100.

Tabel 3. Persentase Penduduk 7–18 Tahun menurut Kelompok Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Brebes 2018–2021

Tahun	Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah		
		Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
2018	7–12	0.00	193.112	0.00
	13–15	0.00	96.505	5.493
	16–18	0.00	52.370	53.300
2019	7–12	0.00	33.82	0.19
	13–15	0.00	16.68	0.94
	16–18	0.00	8.69	8.63
2020	7–12	0.35	0.00	0.00
	13–15	0.06	4.57	4.57
	16–18	0.55	47.84	47.84
2021	7–12	0.00	99.99	0.01
	13–15	0.00	94.93	5.07
	16–18	0.00	56.13	43.87

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kabupaten Brebes

Sementara dari sisi Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018–2021 yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Brebes. Pada tabel diatas dapat dilihat secara umum rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Brebes, tingkat angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 7–12 tahun (Sekolah Dasar) tahun 2018 dan 2021 lebih tinggi dari tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2018 dan 2021 angka partisipasi sekolah diatas 90%, artinya dari total penduduk berusia 7–12 tahun di Kabupaten Brebes yang tidak bersekolah lagi/tidak pernah sekolah hanya 0,01 persen. Hanya saja angka itu menurun pada tahun 2019 dan 2020 yaitu angka partisipasi sekolahnya dibawah rata-rata APS Nasional. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 dan 2020 telah terjadinya pandemi covid-19 sehingga angka tersebut lebih rendah daripada tahun 2018 dan tahun 2021.

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa nilai APS di Kabupaten Brebes pada tahun 2018–2021 cenderung mengalami penurunan baik pada kelompok umur 7–12 tahun (SD), kelompok umur 13–15 tahun (SMP), maupun kelompok umur 16–18 tahun (SMA). Tetapi, pada tahun 2021 mengalami kenaikan untuk kelompok umur 16–18 tahun (SMA) dariada tahun sebelumnya. Walaupun pada tahun 2021 untuk kelompok umur 16–18 tahun mengalami kenaikan, angka kenaikan APS tersebut belum mampu mencapai target APS Nasional.

### Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar yaitu suatu indikator yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan dapat menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa dari adanya program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) terdapat peningkatan partisipasi bersekolah. Peningkatan tersebut jika dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami kenaikan yang tidak cukup tinggi pada jenjang pendidikan SD–SMP. Jika dilihat dari sisi data APK dan APM dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. APM dan APK menurut Jenjang Pendidikan, 2018-2019

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (Persen)	
	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Kasar (APK)
<b>2018</b>		
SD/MI	98,86	110,13
SMP/MTs	84,83	88,89
SMA/SMK/MA	49,56	69,29
<b>2019</b>		
SD/MI	98,79	111,82
SMP/MTs	83,49	85,37
SMA/SMK/MA	49,52	68,96
<b>2020</b>		
SD/MI	99,18	109,96
SMP/MTs	84,18	88,21
SMA/SMK/MA	49,53	70,34
<b>2021</b>		
SD/MI	99,18	108,56
SMP/MTs	83,36	89,71
SMA/SMK/MA	52,85	73,73

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018–2021

Pada tabel diatas dapat dilihat secara umum rata-rata pada Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Brebes pada tahun 2021 jenjang pendidikan SD sebesar 108,56% penduduk yang berusia 7–12 tahun yang bersekolah SD di Kabupaten Brebes. Walaupun angka pesentase tersebut menurun dari tahun sebelumnya, tetapi angka tersebut masih berada di atas 100 persen. Artinya, jika nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa terdapat penduduk yang sekolah tetapi umur belum mencukupi dan atau melebihi umur yang seharusnya. Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tinggi dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang seharusnya. Pada jenjang SMP jumlah persentase tersebut menurun menjadi 89,71 persen. Persentase APK SMP

menunjukkan kategori tinggi tetapi tidak maksimal. Tetapi, angka persentase tersebut menurun pada jenjang pendidikan SMA yaitu menjadi 73,73 persen. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan masyarakat yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA termasuk ke dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan terdapat penduduk yang bekerja pada usia tersebut dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/SMK/MA.

Pada tabel diatas dapat dilihat secara umum rata-rata pada Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Brebes pada tahun 2021 jenjang pendidikan SD sebesar 99,18% penduduk yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten Brebes. Persentase tersebut mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, jika dibandingkan pada tahun 2018 maka kenaikan tersebut sebesar 0,32 persen. Persentase APM SD menunjukkan kategori tersebut tinggi, tetapi tidak maksimal. Pada jenjang SMP persentase tersebut sebesar 83,36 persen dimana hal tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, penurunan tersebut sebesar 1,47 persen. Tetapi, pada jenjang SMA/SMK/MA angka persentase tersebut mengalami kenaikan yaitu menjadi 52,85% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018. Walaupun penduduk yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun APM pada jenjang SMA/SMK/MA tersebut menunjukkan kategori rendah.

Berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) dapat dimaknai bahwa walaupun mengalami kenaikan angka yang tidak terlalu signifikan dari tahun 2018–2021, tetapi hal tersebut secara umum masih berada dibawah standar atau belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) yang ada di Kabupaten Brebes memiliki dampak tetapi belum sepenuhnya berhasil terhadap peningkatan partisipasi bersekolah. Artinya, program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) belum dapat meningkatkan partisipasi bersekolah, karena indikator dalam keberhasilan program di bidang pendidikan yang dilakukan dapat diukur dari partisipasi warga untuk bersekolah.

## Hambatan Pelaksanaan Program GKB

Dalam hal pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) pemerintah memiliki beberapa hambatan-hambatan tertentu dalam pelaksanaannya, yaitu (1) Faktor data, salah satu hambatan dalam pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) yaitu data. Dalam hal ini, data sangat penting dalam pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) sehingga pelaksanaan dapat lebih maksimal karena sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan; (2) Faktor keperintahan merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). salah satu hambatan dalam pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) yaitu adanya rotasi pemimpin; (3) Faktor anggaran dana, menyatakan terbatasnya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten menyebabkan kenaikan jumlah anak dalam pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) terhambat.

Dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), pemerintah Kabupaten Brebes melakukan upaya penanganannya yaitu dengan cara sosialisasi pemahaman mengenai pentingnya pendidikan melalui program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) kepada masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi catatan bagi Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), yaitu pemahaman antara personal dengan personal lainnya. Dalam hal ini, pemahaman yang dimaksud ialah pemahaman mengenai pentingnya pendidikan sehingga Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) selalu memberikan sosialisasi secara berjenjang. Karena sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan sehingga diharapkan jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Brebes dapat berkurang serta dapat meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan berpeluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik bagi kehidupan seseorang.

Selain sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan, pemerintah Kabupaten Brebes juga melakukan sosialisasi untuk mengenalkan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), yaitu sebuah program untuk menurunkan angka anak putus sekolah. Sosialisasi pengenalan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) tidak hanya dilakukan kepada masyarakat, tetapi sosialisasi juga dilakukan ke lembaga-lembaga sekolah seperti

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) dan Kementerian Agama. Sosialisasi pengenalan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) ini bertujuan untuk meminta dukungan dari semua pihak agar program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dapat berjalan dengan baik.

## Implikasi Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Tidak Sekolah (ATS)

Dalam penanganan kasus anak putus sekolah pekerja sosial memiliki peran-peran yang digunakannya dalam melaksanakan tugas dan peran yang mereka jalani. Implikasi pekerjaan sosial merupakan keterlibatan pekerja sosial dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini tentunya yang berkaitan dengan anak putus sekolah. Di bawah ini merupakan peran pekerja sosial sekolah dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS), yaitu sebagai berikut:

### 1. *Broker*

Peran pekerja sosial sebagai *broker* yaitu mengenai kualitas pelayanan sosial yang ada di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting untuk memenuhi keinginan kliennya dalam memperoleh suatu keuntungan yang maksimal. Dalam hal ini untuk mengatasi masalah Anak Tidak Sekolah (ATS), pekerja sosial dapat menjadi penghubung antara anak dengan lembaga-lembaga pemberi pelayanan masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki sumber-sumber yang dibutuhkan. Selain itu peran pekerja sosial sekolah dalam hal ini, yaitu untuk mengusahakan klien mendapatkan kemudahan dalam menerima pelayanan. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada anak putus sekolah yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.

### 2. *Fasilitator*

Peran sebagai fasilitator, dalam peran ini pekerja sosial memberikan dorongan atau membangkitkan semangat kepada anak putus sekolah dengan menggunakan sumber dan potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya serta mengembangkan potens yang dimilikinya. Dalam hal ini, pekerja sosial dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai program yang akan dilaksanakan, memberikan model atau sebuah contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama untuk merancang sebuah solusi-solusi alternatif dalam menangani permasalahan anak putus sekolah.

### 3. *Motivator*

Sebagai motivator, pekerja sosial memberikan motivasi kepada klien anak putus sekolah dalam hal pendidikan sebagai upaya dalam pengembangan potensi, minat, dan bakat pada generasi muda. Pemberian motivasi klien akan merasa bahwa ada yang peduli dan memperhatikan. Sehingga, klien anak putus sekolah memiliki kesadaran untuk kembali mengenyam pendidikan. Selain itu, pekerja sosial memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan memberikan arahan mengenai bantuan-bantuan atau program-program yang diberikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah dianalisis melalui aspek pelaksanaan program, partisipasi bersekolah, serta hambatan dan upaya dalam pelaksanaan program menunjukkan bahwa dampak program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) belum sepenuhnya berhasil. Secara lebih rinci, dampak pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) terhadap partisipasi bersekolah anak putus sekolah di Kabupaten Brebes dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada aspek pelaksanaan Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) memiliki beberapa alur pelaksanaan program, yaitu pendataan, pengembalian, pendampingan dan pemantauan.
2. Pada aspek partisipasi bersekolah berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah pada IPM, APS, APK, dan APM dapat ditarik kesimpulan bahwa, walaupun mengalami kenaikan angka yang tidak terlalu tinggi dari tahun 2018–2021 secara umum masih berada di bawah standar. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) yang ada di Kabupaten Brebes memiliki dampak, tetapi belum sepenuhnya berhasil terhadap peningkatan partisipasi bersekolah. Artinya, program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) belum dapat meningkatkan partisipasi bersekolah, karena indikator dalam keberhasilan program di bidang pendidikan yang dilakukan dapat diukur dari partisipasi warga untuk bersekolah.
3. Dalam hal pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) pemerintah memiliki beberapa hambatan-hambatan tertentu dalam pelaksanaannya serta upaya

yang dilakukan pemerintah Kabupaten Brebes dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Terdapat 3 hambatan dalam pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), yaitu: (1) Faktor Data; (2) Faktor Kepemerintahan; (3) Faktor Anggaran Dana. Dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), pemerintah Kabupaten Brebes melakukan upaya penanganannya yaitu dengan cara sosialisasi pemahaman mengenai pentingnya pendidikan melalui program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat menjadi percaya mengenai pendidikan khususnya terhadap pentingnya pendidikan untuk generasi selanjutnya.

4. Implikasi pekerja sosial terkait peran-peran pekerja sosial terkait dengan permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) yaitu sebagai perantara (*broker*), fasilitasi (*fasilitator*), dan motivator.

## SARAN

Peneliti dapat memberikan saran yang dapat dijadikan perbaikan yaitu:

1. Pemerintah atau kementerian diharapkan dapat memberikan anggaran yang tepat dan sesuai. Dengan adanya keterbatasan pemberian anggaran dana melalui APBD, maka menyebabkan kenaikan jumlah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dalam pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) terhambat. Hal tersebut juga dapat menghambat proses kegiatan pendampingan dan pemantauan anak tetap bersekolah terhambat.
2. Kurang lengkapnya informasi mengenai program Gerakan Kembali Bersekolah khususnya informasi program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di dunia maya seperti di web resmi Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) dan web resmi Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).
3. Belum adanya upaya pemerintah untuk pemberdayaan kepada Anak Tidak Sekolah

(ATS) yang tidak mau kembali bersekolah. Karena selama melakukan rekoinfirmasi data kepada Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak sedikit anak yang tidak mau kembali bersekolah.

4. Perlu adanya sosialisasi yang intensif serta berkesinambungan kepada masyarakat, orang tua ATS, dan ATS mengenai pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Salah satu faktor dari keberhasilan pendidikan yang maju, yaitu adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang maksimal.
5. Pemerintah diharapkan dapat menambah jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes. Dikarenakan faktor penyebab ATS di Kabupaten Brebes, yaitu anak yang belum pernah sekolah. Dalam hal ini anak yang belum pernah sekolah berasal dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), apabila dari orang tua ABK tersebut ingin menyekolahkan anaknya maka harus sekolah di SLB. Tetapi, yang menjadi kendala yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kabupaten Brebes hanya ada terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hayati, N., Supriadi, & Rustiyarso. (2016). Analisis faktor penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(5), 1–11. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v6i2.18614>
- Sabrina, R., Manurung, A. I., & Sirait, B. A. (2022). Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dari Harapan Lama Sekolah (HLS) di Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4784–4792. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3625>
- Arofah, I., & Rohimah, S. (2019). Analisis Jalur untuk Pengaruh Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pengeluaran Riil Per Kapita Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Saintika Unpam*, 2(1), 76–87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/jsmu.v2i1.2920>
- Pendit Primadewi, N. P., Sri Budhi Kembar, M., & Marhaeni Ngurah, A. A. . (2016). Efektifitas dan Dampak Pelaksanaan Program Beasiswa Miskin dan Berprestasi (BIDIK SIMISI) terhadap Angka Putus Sekolah dan Angka Partisipasi Murni Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(2), 279–292. <https://doi.org/10.4324/9780203780930>
- Ampristi, B., & Setiadi, Y. (2019). Ketahanan Bersekolah Penduduk Usia 7-18 Tahun Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. *Seminar Nasional Official Statistics, 1*, 621–630. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.187>
- Istiqomah, A., Sukidin, & Suharsono, P. (2018). Analisis Partisipasi Pendidikan pada Masyarakat Miskin Dusun Gumuk Limo Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 12(2), 227–235. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8553>
- Lestari, A. A. B., Kurniawan, F., & Ardi, R. B. (2020). Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 4(2), 299–308. <https://doi.org/10.23887/jisd.v4i2.24470>
- Juariyah, S. (2010). Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal ekonomi dan pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/jep.v7i1.577>
- Kamsihyati, T., Sutomo, & FS, S. (2016). Kajian Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap (Study on Factors of School Drop-out in Jangrana Village Kesugihan Sub-district, Cilacap District). *Geo Edukasi*, 5(1), 16–21. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/GeoEdukasi/article/view/1897>
- ## Buku
- Setiawan, H. H. (2018). Peran Pekerja Sosial di Sekolah dalam Menangani Perundungan. *Jurnal Sosio Informa*, 4(1), 328–347.
- Imron, A. (2021). *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara

## Website

<https://jateng.bps.go.id/>

<https://brebeskab.bps.go.id/>

<https://gkb.brebeskab.go.id/>

Kompasiana.com. (22 Juni 2020). Gerakan Kembali Bersekolah sebagai emenuhan Hak Anak. Diakses pada 20 Februari 2022, dari <https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/yabsmine/5eef5e39097f362efa4feba2/gerakan-kembali-bersekolah-sebagai-pemenuhan-hak-anak>

Kombes.net. (22 Mei 2022). Bahrul Ulum Sang Inisiator Gerakan Kembali Bersekolah. Diakses pada 23 Februari 2022, dari

<https://kombes.net/bahrul-ulum-sang-inisiator-gerakan-kembali-bersekolah/>

Menpan.go.id. (20 September 2019). Gerakan Kembali Bersekolah, Langkah Nyata Cerdaskan Generasi Bangsa. Diakses pada 24 Desember 2021, dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/gerakan-kembali-bersekolah-langkah-nyata-cerdaskan-generasi-bangsa>

Radartegal.com. (16 November 2021). Naik 0,21 persen, IPM Brebes Masih Terendah di Jateng. Diakses pada 18 Mei 2022, dari <https://radartegal.com/naik-021-persen-ipm-brebes-masih-terendah-di-jateng.23803.html>